

## **Kami Mengajak Negara-Negara Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Negosiasi Perjanjian Internasional Yang Akan Datang Untuk Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia dari Kegiatan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis lainnya**

Kami berterimakasih atas terselenggaranya dengan baik dua acara United Nations Open-Ended Intergovernmental Working Group (OEIGWG) sebelumnya (tahun 2015 dan tahun 2016) tentang Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis lainnya sehubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pertemuan tersebut menganalisa tentang sifat, ruang lingkup, dan unsur – unsur yang dapat disertakan dalam hal “Instrumen yang mengikat secara hukum pada perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya sehubungan dengan perhormatan terhadap HAM”. OEIGWG akan menyelenggarakan acara lanjutan pada tanggal 23 – 27 Oktober 2017, dalam rangka merundingkan materi dan ruang lingkup instrumen baru tersebut.

Secara global, perusahaan terlibat dalam beberapa permasalahan seperti pencemaran lingkungan, degradasi, pengambilalihan lahan, perbudakan, ancaman terhadap akses obat – obatan dan pelayanan kesehatan, tidak menghormati standard ketenagakerjaan, dan kasus – kasus kekerasan terhadap pembela Hak Asasi Manusia, dan lainnya. Atas pelanggaran – pelanggaran tersebut, perusahaan harus diminta pertanggungjawabannya. Kondisi yang terjadi sekarang, terdapat serangkaian kesenjangan atas peraturan – peraturan yang ada, beberapa disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan beroperasi secara internasional, namun undang-undang/peraturan yang mengaturnya memiliki karakter nasional. Dalam impunitas atau kekebalan perusahaan atas hukum adalah lebih mudah ditangkap bilamana melalui baik institusi nasional maupun internasional. Perjanjian perdagangan dan investasi yang ditandatangani oleh negara – negara memberikan perlindungan yang cukup atas hak privilege perusahaan dan menguntungkan perusahaan, tapi tidak ada peraturan internasional dari negara untuk memastikan bahwa kegiatan operasi perusahaan dilakukan tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Sosialisasi atau pengenalan atas peraturan tanggung jawab perusahaan secara nasional dan internasional sangat dibutuhkan sehingga negara – negara tersebut dapat memulai kewajiban mereka untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan Ibu Pertiwi terhadap kegiatan bisnis yang merugikan.

Kami percaya bahwa perdebatan yang telah banyak terjadi di OEIGWG selama ini menunjukkan perlunya ada instrument yang mengikat, baik secara internasional, untuk 1) meningkatkan perlindungan individu dan masyarakat yang terkena dampak terhadap pelanggaran yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan bisnis, 2) memberikan mereka akses untuk pemulihan yang efektif, khususnya melalui mekanisme peradilan. Sesi ini termasuk dalam hal saling bertukar pemikiran dan debat antar perwakilan komunitas tersebut, para ahli hukum, aktivis, anggota parlemen, dan bahkan perwakilan dari perusahaan/komunitas bisnis dari berbagai sektor dan daerah, dengan perwakilan negara (DPR). Sesi ini telah memberikan kontribusi dalam melakukan identifikasi persamaan pendapat untuk mendorong kemajuan proses lebih lanjut penjabaran terhadap perjanjian berdasarkan kewajiban utama negara untuk melindungi HAM, termasuk ekstrateritori.

Mobilisasi organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional yang telah berkembang secara signifikan dan konstan di PBB telah menjadi kunci untuk mendukung proses tersebut serta menunjukkan pentingnya prospective treaty (rancangan perjanjian/perundang - undangan) untuk memperjuangkan keadilan sosial dan HAM di dunia.

Instrumen baru yang mengikat secara hukum harus menjadi langkah yang lebih maju dalam mempromosikan dan melindungi HAM, mengembangkan usaha-usaha yang telah ada sebelumnya, dan mempertahankan kerangka pelengkap instrumen-instrumen HAM internasional yang ada. Satu set kewajiban yang mengikat dan mekanisme penegakan hukum adalah langkah logis dan penting berikutnya dalam proses yang telah dimulai beberapa dekade yang lalu. Perjanjian tersebut harus menentukan keutamaan hukum HAM di atas hak – hak istimewa perusahaan yang diabadikan dalam kerangka kerja yang bias dan tidak adil yang dibuat dalam perjanjian perdagangan dan investasi. Hal tersebut juga harus membangun kerangka kerja internasional yang kuat untuk akuntabilitas hukum perusahaan guna memastikan akses terhadap keadilan bagi individu dan masyarakat yang terkena dampak dan dengan demikian mengakhiri impunitas bisnis. Kerjasama internasional antar negara harus diperkuat untuk mengatasi tantangan regulasi global ini.

Untuk mensukseskan sesi ini, maka periode ketiga dari OEIGWG harus terdiri dari 1) diskusi/perundingan yang substantive, kooperatif, dan konstruktif antar negara mengenai unsur – unsur konkret dan terperinci mengenai isi dan ruang lingkup perjanjiannya, 2) pendekatan partisipatif (participatory approach) untuk memastikan perspektif masyarakat sipil yang beragam, dan 3) penyusunan rencana kerja untuk menyelesaikan negosiasi dalam waktu singkat.

Kami menekankan komitmen kuat kami terhadap proses tersebut, pada kesempatan ini kami mendesak semua negara untuk fokus pada negosiasi isi perjanjian. Kami juga mengajak masyarakat untuk menaruh perhatian terhadap keadaan kritis ini dan secara aktif memobilisasi, baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional.